

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.¹

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, namun juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang

¹Nordiawan, "Akuntansi Pemerintahan", (Jakarta:Salemba Empat,2007), hal 1

semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan tentang desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya yang disebut dengan Undang-undang desa.² Desa memberikan dampak yang besar, dimana desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana

²Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 10

Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran. Kemudian yang melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa ini membuat jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bangsa.³ Karakteristik pelaksanaan *good governance* untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵ Pengelolaan keuangan desa yang baik dengan prinsip-prinsip *good governance* membutuhkan akuntabilitas,

³I Nyoman Tri Wandari, Edy Sujaba, I Made Pradana Adi Putra “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketetapan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng*” (*e-journal SI Ak*, Vol 3 No.1 2005) hal. 2

⁴Mardiasmo “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002) hal. 183

⁵Risya Umami, “*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*”, *e-Jurnal Katalogis*, Volume 6 Edisi 1 (2017), hal. 74

transparansi dan responsif dimaksudkan agar aparat desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya public kepada pihak pemberi perintah atau pihak yang berkepentingan. Akuntansi publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Responsif adalah kewajiban pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakat untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.⁶Ketiga prinsip *good governance* tersebut sangat berpengaruh untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tepat.

Dalam pengelolaan dana desa Pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara penetapan besaran dana desa bagi setiap desa di Kabupaten Blitar. Dalam Perbup No 10 Tahun 2018 Pasal 8 dijelaskan bahwa besaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2018 dihitung dengan bobot 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis. Besaran dana desa tersebut membuat para pengelola keuangan desa rawan untuk

⁶Weni Ultafiah, "Pengaruh Akuntabilitas, Transaparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2017), hal. 5

melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Bukan hanya dana desa saja yang rawan untuk melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan, dana yang lainnyapun dapat membuat para pengelola keuangan desa rawan melakukan penyimpangan terhadap pengelolaannya.⁷

Kecamatan Srengat memiliki 15 desa dan Kecamatan ponggok memiliki 15 desa. Adapun permasalahan yang terjadi tepatnya di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok, yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahnya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ketidaksiuaian tersebut terletak pada pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, yaitu mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD), dimana pengelolaan keuangan desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan desa menggunakan ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintah dan pembinaan masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas, transparansi dan responsif.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Gayatri, Made Yeni Latrini yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat

⁷http://arsip.jdih.blitarkab.go.id/upload/215/PERBUP_NO_10_TAHUN_2018.pdf.
(diakses pada 18 Oktober 2021)

Pedesaan”.⁸Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa dan terdapat hubungan kuat antar variabel tersebut atas variabel transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel responsif. Sedangkan penelitian yang ini menambahkan variabel responsif sebagai pembeda dengan penelitian Gayatri.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Rina indrawati Syafi’I.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengelolaan alokasi dana desa, variabel kebijakan desa, dan variabel kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat pula pengaruh secara simultan antara variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan penduduk. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel transparansi dan responsif. Sedangkan penelitian ini menambahkan variabel bebas yakni variabel transparansi dan responsive sebagai pembeda dengan penelitian Rina indrawati Syafi’I.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Christa Yunnita Garung.¹⁰

⁸ Gayatri, Made Yeni Latrini, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan" *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 10 No. 2, 2017

⁹ Rina Indrawati Syafi’i, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa dan Kelembgaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang", (Skripsi: Universitas Islam Malang, Malang, 2018)

¹⁰ Chrita Yunnita Garung, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka" *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol. 8, No. 1, 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan menginginkan tata kelola yang baik di desa Manules Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea Kabupaten Sasitamean Kabupaten Malaka. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel responsive sebagai pembeda dengan penelitian Christa Yunnita Garung.

Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas, Transparansi Dan Responsif Dalam Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsif dalam pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa. Batasan variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansif dan responsif dalam pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar?
2. Apakah transparansi mempengaruhi pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar?
3. Apakah responsive mempengaruhi pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan responsif mempengaruhi pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar
3. Untuk mengetahui pengaruh responsif terhadap pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar.

4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran didalam kajian ilmu akuntansi publik dan sebagai referensi penelitian yang akan datang khususnya mengenai bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan, dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dapat sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian selanjutnya atau memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian berikutnya yang lebih baik.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup dan batasan penelitian bertujuan untuk memberikan

gambaran dan arah mengenai informasi permasalahan dalam suatu penelitian agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Ruang lingkup penelitian terdiri dari empat variabel yakni variabel bebas. X_1 yaitu transparansi, X_2 yaitu akuntabilitas, X_3 yaitu responsif dan variabel terikat Y_1 yaitu pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini penulis memberi batasan atas permasalahan yang ada dikarenakan waktu yang singkat dan agar peneliti lebih fokus serta tidak meluas dalam pembahasannya yang dimaksud, yaitu akuntabilitas, transparansi dan responsif dalam proses pengelolaan keuangan desa Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok.

G. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari salah paham atas permasalahan yang ada pada penelitian ini yang berjudul “Akuntabilitas, Transparansi dan Responsif Dalam Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Ponggok di Kabupaten Blitar” maka penulis akan memberikan makna dari istilah yang terkandung di dalam judul tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dan keharusan (kewajiban) pelayanan public yang dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggungjawaban yang dimaksud akan bermuara pada hukum, peraturan dan regulasi, kode

etik profesi, nilai yang dianut seseorang, tingkah laku, etika dan kepercayaan.¹¹

b. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga tercapai pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹²

c. Responsif

Responsif adalah responsif dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good and clean governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asa responsif dan asas unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual dan social.¹³

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan

¹¹ M.Idris Patarai “*Akuntabilitas Publik*”(Makassar:Penerbit De La Macca,2015) hal.29

¹²Harnovinsah, Ana Sopanah dan Rida Perwita “*Isu Kontemporer Akuntansi Publik*”(Surabaya:Peberbit Media Perkasa,2020) hal.297

¹³Joko Purnomo “*Penyelenggaraan Pemerintah Desa*”(Yogyakarta:Penerbit Infest,2016)hal 25

pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁴

2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel secara operasional yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai judul penelitian.

a. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan rancangan perantaraan desa yang melibatkan unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang kemudian disusun oleh sekretaris desa yang kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD, kemudian dievaluasi oleh bupati dan terakhir penetapan APBDes oleh kepala desa.¹⁵

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud adalah proses penggunaan keuangan desa berupa pengeluaran dan pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang disertai dengan bukti yang lengkap dan benar berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.¹⁶

c. Penatausahaan

Penatausahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

¹⁴ V Wiratna Sujarweni “*Akuntansi Desa*”(Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015) hal. 17

¹⁵ Ibid.,hal. 31

¹⁶Puji Agus,”*Pengelolaan Keuangan Desa*”,(Palembang,Penerbit YPLBBA,Anggota IKAPI:2019), hal.54

mengenai ketaatan bendahara desa dalam desa dalam melakukan penyusutan buku kas umum, kas pembantu pajak, dan buku bank serta mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban.¹⁷

d. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud adalah mengenai ketaatan kepala desa dalam melakukan penyampian laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama atau semester akhir tahun.¹⁸

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mengenai ketaatan kepala desa dalam melakukan penyampian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran serta menginformasikan kepada masyarakat.¹⁹

H. Sistematika Penelitian

Sistematika skripsi dibuat dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Sistematika skripsi ini terbagi atas tiga bagian yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Berikut ini rincian yang lebih jelasnya.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul,

¹⁷ Ibid.,hal 78

¹⁸ Ibid.,hal 82

¹⁹ Ibid.,hal 84

halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, perse, bahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

1. **Bab I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah dan sistematika skripsi.
2. **Bab II landasan Teori**, terdiri dari teori yang membahas variable/sub variable pertama, teori yang membahas variable/sub variable kedua, dan seterusnya jika ada, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.
3. **Bab III Metode Penelitian**, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian populasi sampling dan penelitian sumber dan sumber penelitian, sumber data, variable dan skala pengukurannya, Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.
4. **Bab IV Hasil penelitian**, terdiri dari hasil penelitian (yang berisi dekskripsi data dan pengujian hipotesis) dan temuan penelitian.
5. **Bab V Pembahasan**, berisi pembahasan data penelitian dan hasil Analisis data.
6. **Bab VI Penutup**, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

Bagian Akhir merupakan bagaian terakhir skripsi yang berisikan

uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.